

# **PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATU DATA INDONESIA**

**Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian PPN/Bappenas**  
(Selaku Ketua Tim Penyusunan Ranperpres Satu Data Indonesia)

Jakarta, 23 Agustus 2017

Home >>> Bappenas Koordinasikan Pusat Data Kementerian

## Bappenas Koordinasikan Pusat Data Kementerian

JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan penggunaan satu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan mulai digunakan dalam perencanaan program tahun anggaran 2017. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djajil, lembaganya sedang mengoordinasikan hal tersebut.

"Jadi, semua data akan sama dan kita sharing," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/4). Menurut Sofyan, Kementerian PPN/Bappenas sedang mengoordinasikan pusat data di seluruh kementerian/lembaga (K/L).

Tujuannya agar hanya ada satu data yang komprehensif. "Jadi nanti Anda tidak perlu lagi tawaf (keliling) mencari data," kata Sofyan.

Lebih lanjut, Sofyan menyebut, Bappenas akan segera menindaklanjuti penghentian program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi di berbagai K/L. "Tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS saja," ujar mantan menteri koordinator bidang perekonomian tersebut.

Berbicara di Istana Negara, Selasa (26/4), Presiden Joko Widodo menegaskan, mulai saat ini, patokan data hanya ada di BPS. Hal ini disebabkan berbeda-bedanya data yang dimiliki oleh K/L.

Padahal, salah satu kunci untuk memenangi persaingan antarnegara adalah dengan memiliki data dan informasi yang strategis, akurat, dan berkualitas. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil, betul-betul berdasarkan acuan yang sah.

Ekonom dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengatakan, pemberian mandat agar BPS bisa dijadikan lembaga rujukan dalam penetapan kebijakan memang sudah tepat. Sebab, untuk pengambilan kebijakan, pemerintah jangan sampai mempunyai terlalu banyak data yang hampir sama, namun diambil dari berbagai K/L.

Untuk itu, BPS wajib bekerja keras untuk pemutakhiran data yang sudah ada sekaligus memperbanyak data yang ada agar bisa digunakan juga oleh K/L. "Yang jadi tantangan selama ini memang apakah betul data yang dikeluarkan BPS ini valid. Karena data ini biasanya kurang detail sehingga tidak mendapatkan kepercayaan menyeluruh," ujar Ina.

Menurut Ina, tidak validnya data ini bisa disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) yang kurang sehingga data yang dihimpun tidak meyakinkan. Penyebab lainnya lantaran dana untuk melakukan survei minim. Sehingga, petugas di lapangan pun tidak sepenuhnya melakukan survei.

Untuk menanggulangi hal ini, BPS harus bekerja sama dengan K/L yang juga memiliki SDM untuk melakukan survei. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh BPS agar pengambilan sampel lebih banyak dan membuat data yang nantinya disuguhkan lebih akurat. "Misal pengambilan data oleh K/L, nanti yang mengolahnya BPS. Data akhirnya juga akan digunakan K/L tersebut," kata Ina.

Ina mencontohkan, untuk survei tingkat kemiskinan, BPS bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pemerintah daerah, dalam hal ini kecamatan atau RT/RW untuk melakukan pendataan. Karena personel yang lebih banyak ini dipastikan bisa lebih akurat. "Kondisi sekarang kan jauh dari dulu. Makanya cara survei bisa menggunakan strategi baru," ujar Ina.

### Konsekuensi BPS

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo menilai, arahan Presiden memiliki konsekuensi yang tidak ringan bagi BPS. Beban dan tanggung jawab lembaga ini akan lebih besar.

Sebab, hampir semua data yang biasanya dikeluarkan K/L harus dimiliki BPS. "Tentu saja butuh peningkatan dukungan budget (anggaran) dan SDM (sumber daya manusia) yang memadai untuk dapat berfungsi optimal," ujar Sasmito.

Selain kesiapan anggaran dan SDM, Sasmito menyebut, BPS juga akan menyediakan prasarana nonfisik yang dapat memastikan semua kebijakan dan keputusan berbasis data serta informasi yang akurat. "Pembangunan prasarana nonfisik ini menjadi berat dan besar," katanya.

Selain itu, lanjut Sasmito, berbasis hasil Sensus Ekonomi 2016, statistical business register dapat diperbaiki setiap saat di kemudian hari. Syaratnya, semua K/L dan institusi pemberi izin secara daring terhubung ke sistem komputer BPS. "Dengan sistem terintegrasi dan terkoneksi demikian, perbedaan data antar lembaga akan hilang," ujarnya.

rep: Debbie Sutrisno/antara, ed: Muhammad Iqbal

# LATAR BELAKANG

"Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi-tradisi lama di mana perencanaan dan penganggaran banyak dan ada yang tidak sambung, tidak sinkron .... Dan ini saya tekankan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Dan perencanaan betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi, antar sektor, antar wilayah, antar pusat dan daerah, dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral."

Presiden Joko Widodo, 13 April 2016

Pidato pada Rapat Terbatas Kabinet tentang Rancangan Inpres Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di Kantor Kantor Presiden.



Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan dimulai sejak T-2 dan berlangsung hingga T+1.

Aktivitas seperti yang tergambar di samping, menggunakan dan menghasilkan data.



## Ini Kementerian/Lembaga yang Disebut Jokowi Menyajikan Data Berbeda-beda

Maikel Jefriando - detikfinance  
Selasa, 26/04/2016 19:36 WIB



Foto: Maikel Jefriando

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaan atas data yang selama ini diberikan oleh Kementerian Lembaga (K/L). Bukannya membantu, data tersebut justru menimbulkan keraguan saat pengambilan keputusan.

Ada beberapa K/L yang disebutkan langsung oleh Jokowi, lengkap dengan data yang disediakan. Ini disampaikan saat Jokowi melakukan penanaman sensus ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Di antaranya adalah Kementerian Kesehatan (Kemkes) dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk data kemiskinan. Kemudian data pangan yang tersedia di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Indonesia baru saja mengarusutamakan Agenda Pembangunan Pasca-2015 ke dalam rencana pembangunan nasionalnya. (...) Izinkan saya mengakhiri pidato saya dengan meyakinkan kembali bahwa Indonesia siap untuk bekerja bersama untuk memastikan bahwa Agenda Pembangunan Pasca-2015 kita ini tidak hanya sebatas impian, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan bagi semua."

Wakil Presiden Jusuf Kalla, 26 September 2015

Pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Markas PBB, New York, AS.



# PERKEMBANGAN RANPERPRES SATU DATA INDONESIA

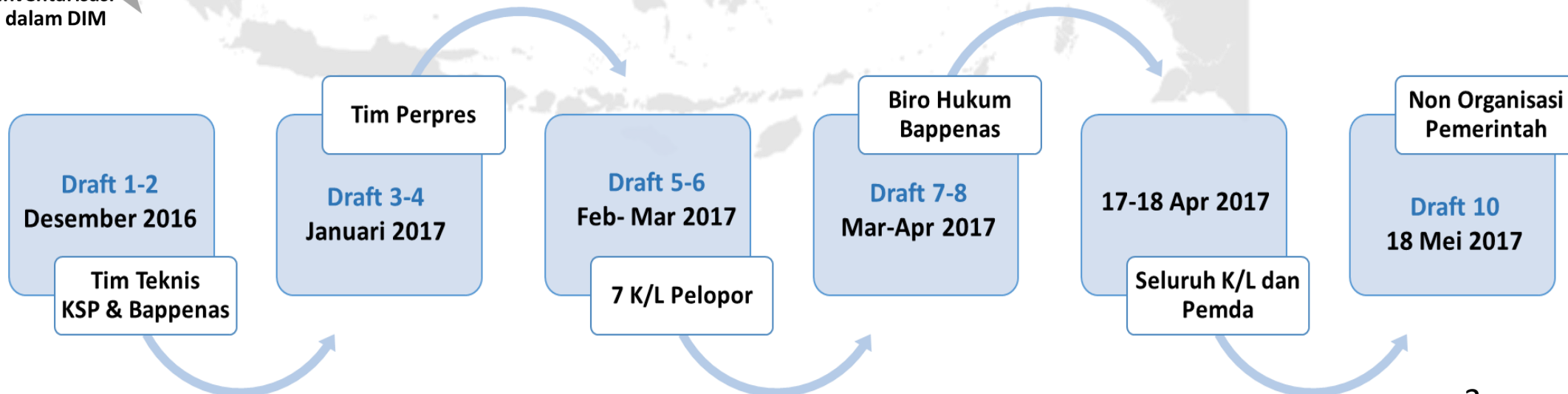


Hingga saat ini, *draft* Ranperpres Satu Data telah mencapai **Versi 10**, dengan masukan dari:

1. Kementerian dan Lembaga
2. Perwakilan Pemerintah Daerah, dan
3. Publik



Tim Penyusun Ranperpres Satu Data melakukan diskusi secara **iteratif dan partisipatif**.





# TUJUAN RAPAT TIM PENYUSUNAN RANPERPRES SATU DATA INDONESIA

- Finalisasi Ranperpres Satu Data Indonesia oleh tim penyusun;
- Pembahasan Rencana Pengajuan Rapat Terbatas tentang Satu Data Indonesia kepada Presiden



← 2016 – Maret 2017

Mei 2017

Juli 2017 →

Iterasi tim penyusun dan KL  
pelopor

Iterasi K/L/D/I

Iterasi K/L/D/I  
Publik

**FINALISASI OLEH TIM  
PENYUSUN &  
PENGAJUAN RATAS**

*Forum antar kementerian*

*Forum Konsultasi Publik*



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : B.346 /M.PPN/Ses/HM.01.03/08/2017 Jakarta, 8 Agustus 2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Mengagendakan Sidang Kabinet  
Inisiatif Satu Data Indonesia

Yth. Presiden Republik Indonesia  
di Jakarta

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 13 April 2016 tentang Rancangan Inpres Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi, antarsektor, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah serta arahan Bapak Presiden dalam acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 tanggal 26 April 2016, bahwa data harus akurat dan tidak boleh berbeda-beda, agar tidak menyulitkan dalam pembuatan kebijakan, dengan ini kami sampaikan bahwa kedua arahan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Inisiatif Satu Data Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk mengagendakan Sidang Kabinet pada akhir bulan Agustus 2017 guna melaporkan perkembangan Inisiatif Satu Data Indonesia untuk memperoleh arahan Bapak Presiden sekaligus masukan dari para Menteri.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Presiden kami mengucapkan terima kasih.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  
Bambang P.S. Brodjonegoro

Tembusan:

1. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
3. Yth. Sekretaris Kabinet.



Menteri PPN/Kepala Bappenas telah mengajukan Permohonan Rapat Kabinet Terbatas kepada Bapak Presiden pada tanggal 8 Agustus 2017.



Tujuan permohonan Ratas adalah melaporkan kembali kepada Bapak Presiden terkait pelaksanaan arahan Sidang Kabinet tanggal 13 April 2016 tentang Rancangan Inpres Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta arahan Presiden pada Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara.



Kedua arahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Inisiatif Satu Data Indonesia



**TERIMA KASIH**